

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga, pemenuhannya merupakan salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat. Hak atas pangan sudah diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan yakni pada komoditas beras tidak selalu diikuti dengan pengurangan rawan pangan di masyarakat (Hanani, 2012).

Bagi Indonesia sektor pangan dapat sekaligus menjadi sektor penentu tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk pedesaan yang bekerja di *off-farm*, diantaranya terdiri dari petani berlahan sempit dan buruh tani yang sebagian besar adalah rakyat miskin. Selain itu, pentingnya pangan juga menentukan kesejahteraan konsumen miskin perkotaan yang sebagian besar porsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi (Arifin, *et al*, 2011).

Upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di suatu daerah, yaitu dengan mengetahui mengenai siapa, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, dimana mereka tinggal serta apa saja yang membuat mereka rentan (Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur dan World Food Programme, 2015). Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Kasus rawan pangan telah dikenal sejak dekade 60-an, bahkan pada masa penjajahan Jepang, *insiden* rawan pangan dikenal dengan istilah *Hunger Oedeem* (HO) atau busung lapar (Purwantini, 2014).

Data Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk sebesar 38,548,407 jiwa. Jumlah penduduk yang hanya mampu memenuhi AKG < 70% yaitu sebanyak 13,56%. Jumlah penduduk yang mampu memenuhi AKG 70-89,9% yaitu sebanyak 35,93% dan jumlah penduduk yang mampu memenuhi AKG < 90% yaitu sebanyak 50,51% (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2015). Berdasarkan pernyataan dari Purwantini (2014) jika konsumsi perkapita kurang dari 70% dari AKG (konsumsi energi < 1.400 kkal/kapita/hari) dapat dikategorikan sangat rawan pangan, 70 hingga 89,9% dari AKG

dikategorikan rawan pangan dan lebih dari 90% dari AKG termasuk dalam kategori tahan pangan. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa provinsi Jawa Timur masih tergolong tahan pangan. Provinsi Jawa Timur juga dikenal sebagai provinsi penyangga pangan di Indonesia, namun terdapat 8 wilayah yang masuk dalam kategori rawan pangan, yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Romadhon, 2011).

Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan 10 wilayah sebagai kecamatan pesisir (Modung, Kwanyar, Labang, Kamal, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Klampis, Sepuluh dan Tanjung Bumi) dan 8 wilayah teresterial (Burneh, Kokop, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Geger dan Blega). Berdasarkan kondisi geografis kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan dari sisi fisik topografi dan sosial ekonomi sehingga dapat berpengaruh terhadap sebaran sumber daya yang tidak merata yang akhirnya terdapat beberapa wilayah yang rentan terhadap rawan pangan di Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu, perlu adanya penelitian yang membahas mengenai Pemetaan Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Badan Ketahanan Pangan R.I dan Program Pangan Dunia PBB, (2003) terdapat 15 indikator untuk mendeteksi kerawanan pangan pada suatu daerah. Namun metode penyusunan indikator penduduk/wilayah rawan pangan tidak dapat sepenuhnya menggunakan indikator dari daerah lainnya maupun metode yang berlaku pada level nasional. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa masing-masing wilayah kabupaten/kota yang memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi adanya kerawanan di Kabupaten Bangkalan. Data dalam penelitian tersebut menunjukkan seberapa besar tingkat kerawanan pangan pada suatu daerah. Namun zaman semakin berkembang, dan dengan diiringi jumlah penduduk yang semakin meningkat maka, data-data tersebut juga mengalami perubahan. Perubahan yang dialami dapat berupa besarnya peningkatan atau penurunan pada tingkat kerawanan pangan di suatu wilayah/kecamatan. Sehingga,

pembaruan (*updating*) data sangat diperlukan supaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat. Jadi, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanan menentukan tingkat kerawanan pangan pada tingkat Kecamatan di kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peta kerawanan pangan tingkat kecamatan di kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menentukan tingkat kerawanan pangan berdasarkan indikator kerawanan pangan pada tingkat kecamatan di kabupaten Bangkalan
2. Memetakan daerah berdasarkan indikator kerawanan pangan pada tingkat kecamatan di kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembacanya. Berikut merupakan beberapa manfaat:

1. Dapat mengetahui indikator-indikator yang digunakan dalam penentuan daerah rawan pangan
2. Dapat mengetahui daerah-daerah di Kabupaten Bangkalan yang tergolong daerah sangat rawan, rawan pangan dan tahan pangan berdasarkan pemetaan yang dilakukan
3. Memberikan gambaran bagi pemerintan daerah tentang pemetaan daerah rawan pangan ditingkat kecamatan kabupaten Bangkalan
4. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan serta strategi kebijakan mengenai ketahanan pangan ditingkat kecamatan Kabupaten Bangkalan.